

INTEGRASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 14 MELALUI PRAKTIK *BLUE ACCOUNTING* PADA PT. PELNI (PERSERO)

Junardi

Politeknik Tonggak Equator, Pontianak

Email: jun.thriller7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Sustainable Development Goal (SDG) 14: Life Below Water dalam praktik akuntansi dan pelaporan keberlanjutan PT. PELNI (Persero). Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus berbasis analisis isi pada dokumen laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PELNI telah melaksanakan sejumlah program seperti penanaman mangrove, revitalisasi terumbu karang, pengelolaan limbah kapal, pengurangan emisi, serta edukasi masyarakat pesisir. Program-program ini dapat diklasifikasikan sebagai *blue expense* yang relevan dengan indikator SDG 14 dan standar *Global Reporting Initiative* (GRI). Meskipun terdapat peningkatan narasi, transparansi, dan kuantifikasi aktivitas dari tahun ke tahun, klasifikasi keuangan *blue expense* belum secara eksplisit disajikan dalam laporan resmi. Evaluasi menunjukkan bahwa dimensi integrasi narasi dan transparansi data sudah cukup baik, namun klasifikasi

Kata Kunci : *Blue Accounting*; SDG 14; *Blue Expense*; PT. PELNI; Sustainability Reporting

ABSTRACT

This study aims to analyze the integration of Sustainable Development Goal (SDG) 14: Life Below Water into accounting practices and sustainability reporting of PT. PELNI (Persero). The research employed a qualitative descriptive approach with a case study method using content analysis of annual and sustainability reports from 2019 to 2023. The findings reveal that PT. PELNI implemented various initiatives such as mangrove planting, coral reef restoration, ship waste management, emission reduction, and coastal community education. These programs can be classified as blue expenses aligned with SDG 14 indicators and the Global Reporting Initiative (GRI) standards. Although there has been significant progress in narrative disclosure, transparency, and quantification of activities over time, the classification of blue expenses has not been explicitly presented in official reports. The evaluation shows that narrative integration and data transparency are adequate, while financial classification and indicator mapping remain partial. This study recommends the development of a blue expense classification system, integration of SDG–GRI–cost–output mapping into sustainability reporting, and improvement of data auditability. Therefore, PT. PELNI has the potential to become a pioneer in applying blue accounting within Indonesia's maritime sector.

Keywords : *Blue Accounting*; SDG 14; *Blue Expense*; PT. PELNI; Sustainability Reporting

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mencakup sekitar 70% dari total luas wilayah. Potensi sumber daya laut Indonesia sangat besar dan strategis, meliputi sektor transportasi maritim, perikanan, pariwisata bahari, hingga energi kelautan. Namun, pemanfaatan yang berlebihan telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut seperti pencemaran, degradasi terumbu karang, dan penurunan kualitas biota laut (Ardiansyah & Umarella, 2022). Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), di antaranya SDG 14 Life Below Water yang menekankan pentingnya konservasi serta pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan (Huck, 2022).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep *blue economy* dan turunannya, *blue accounting*, menjadi semakin relevan (Krestiwanda & Utami, 2024). *Blue accounting* berfungsi sebagai instrumen pencatatan dan pelaporan aktivitas serta pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem laut, termasuk konservasi pesisir dan pengelolaan limbah laut (Failler et al., 2023; Winarsih et al., 2020). Pendekatan ini tidak hanya mencatat biaya lingkungan seperti pengelolaan limbah laut dan konservasi pesisir, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam proses pelaporan akuntansi perusahaan (Syah et al., 2020).

PT. PELNI (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pelayaran nasional, memiliki hubungan erat dengan ekosistem laut melalui operasi armadanya. Aktivitas bisnis perusahaan tidak hanya mendukung konektivitas antarwilayah, tetapi juga menimbulkan potensi dampak lingkungan berupa emisi kapal, limbah, dan aktivitas di wilayah pesisir. Oleh karena itu, praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan ini menjadi studi yang penting untuk mengetahui sejauh mana pengeluaran yang mendukung konservasi laut (*blue expense*) telah diakui, diukur, dan disajikan dalam laporan perusahaan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menegaskan bahwa praktik *blue accounting* di Indonesia masih belum sistematis. Abreu et al. (2019) menekankan perlunya standar akuntansi laut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan, sementara Khaddafi & Ilham (2024) menyoroti bahwa di sektor publik maupun privat, pencatatan atas pengeluaran untuk konservasi laut dan dampak lingkungan masih belum dibakukan.

Penelitian yang spesifik mengkaji implementasi *blue accounting* pada BUMN maritim juga masih jarang ditemukan, padahal sektor ini memiliki peran penting dalam pencapaian SDG 14 secara nasional.

Beberapa studi terdahulu telah menunjukkan bahwa praktik *Blue accounting* mulai diterapkan dalam konteks lokal, seperti pada pemerintah desa pesisir dan sektor pariwisata bahari, namun penelitian yang secara spesifik mengkaji integrasi *Blue accounting* dalam laporan korporat BUMN maritim masih sangat terbatas. Padahal, peran sektor maritim sangat krusial dalam mendukung pencapaian SDG 14 secara nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis integrasi SDG 14 dalam praktik akuntansi PT. PELNI, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan *blue expense*, serta mengevaluasi kesesuaian praktik pelaporan perusahaan dengan prinsip *blue accounting* dan kerangka internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur akuntansi keberlanjutan serta manfaat praktis bagi perusahaan maritim dalam mengembangkan sistem pelaporan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan beroperasi berdasarkan kontrak sosial tidak tertulis dengan masyarakat, di mana eksistensi dan pertumbuhan perusahaan bergantung pada sejauh mana aktivitasnya dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku (Suchman, 1995). Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi lingkungan dan sosial sebagai upaya untuk memperoleh, mempertahankan, atau memulihkan legitimasi di mata pemangku kepentingan (Deegan, 2002)

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan 17 tujuan dan 169 target untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 (Huck, 2022).

Salah satu tujuan utama yang relevan dalam konteks kelautan adalah SDG 14: Life Below Water, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber

daya laut, samudra, dan ekosistem pesisir. Berdasarkan situs resmi United Nations (2024), SDG 14 terdiri dari 10 target utama yang diukur melalui indikator-indikator spesifik. Beberapa target yang paling relevan dengan praktik keberlanjutan di sektor maritim antara lain:

- 1.Target 14.1: Mengurangi polusi laut, diukur melalui indikator kepadatan sampah plastik dan eutrofikasi.
- 2.Target 14.2: Perlindungan ekosistem laut dan pesisir melalui pendekatan berbasis ekosistem.
- 3.Target 14.3: Penurunan asidifikasi laut (pH).
- 4.Target 14.5: Konservasi kawasan laut minimal 10% dari total wilayah laut.
- 5.Target 14.7: Meningkatkan kontribusi ekonomi dari sektor kelautan secara berkelanjutan.
- 6.Target 14.b: Memberikan akses bagi nelayan kecil tradisional ke sumber daya laut dan pasar.
- 7.Target 14.c: Implementasi hukum internasional tentang kelautan.

Perusahaan dapat memetakan program-program CSR kelautan, konservasi, pengelolaan limbah kapal, dan inisiatif pelibatan masyarakat pesisir pada indikator-indikator di atas untuk mendukung pencapaian SDG 14.

Blue accounting

Blue accounting adalah bentuk akuntansi keberlanjutan yang menekankan pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan ekosistem laut dan sumber daya pesisir. Konsep ini bertujuan untuk:

- 1.Menyediakan transparansi atas penggunaan dan perlindungan laut
- 2.Mendukung pengambilan keputusan strategis dalam sektor maritim
- 3.Mengintegrasikan pelaporan keuangan dengan keberlanjutan lingkungan laut (Winarsih et al., 2020)

Menurut Abreu et al (2019), *blue accounting* mencakup upaya valuasi dan pelaporan terhadap pertumbuhan kelautan yang berkelanjutan melalui standar pelaporan baru yang mencerminkan tiga aspek: sifat, besaran, dan alasan klasifikasi aktivitas kelautan. Sementara itu, Failler et al (2023) menekankan bahwa *blue accounting* memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan data sosial, ekonomi, dan

ekologi untuk menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan secara nasional dan internasional.

Blue expense

Blue expense merupakan bagian dari akuntansi keberlanjutan yang merujuk pada biaya atau pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk kegiatan yang berkontribusi langsung pada pelestarian, perlindungan, dan pemulihan ekosistem laut dan pesisir. Biaya ini dapat mencakup:

1. Pengelolaan limbah laut dari kapal dan pelabuhan
2. Investasi dalam teknologi kapal ramah lingkungan
3. Konservasi dan restorasi kawasan pesisir
4. Edukasi masyarakat pesisir dan nelayan
5. Penelitian kelautan dan pemantauan biodiversitas (Abreu et al., 2019)

Menurut Syah et al (2020), pengungkapan *blue expense* secara eksplisit akan memperkuat posisi perusahaan dalam pelaporan ESG dan membantu meyakinkan pemangku kepentingan terhadap komitmen keberlanjutan perusahaan.

Global Reporting Inisiative (GRI)

GRI Standards adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi dalam menyusun laporan keberlanjutan yang konsisten dan dapat dibandingkan. GRI merupakan kerangka kerja dominan dalam pelaporan keberlanjutan baik di negara maju maupun berkembang. GRI menunjukkan efektivitas dalam mengadaptasi pengalaman negara maju ke konteks negara berkembang melalui sistem yang fleksibel dan berfokus pada peningkatan berkelanjutan (Mougenot & Doussoulin, 2023).

Berdasarkan data dari GRI & UN Global Compact (2022), beberapa standar GRI yang relevan dengan SDG 14 dan konsep *blue accounting* antara lain:

1. GRI 306-2: Pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan, termasuk limbah laut dari kapal.
2. GRI 304-3: Konservasi dan pemulihan habitat laut
3. GRI 413-1: Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan program.
4. GRI 307-1: Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.

Fokus Studi

Berdasarkan kajian literatur, dapat dirumuskan bahwa penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana PT. PELNI mengintegrasikan prinsip SDG 14 dalam laporan akuntansi dan keberlanjutan?
2. Jenis dan tren pengeluaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *blue expense*?
3. Sejauh mana praktik pelaporan PT. PELNI sesuai dengan prinsip *blue accounting* dan indikator GRI?

Dengan fokus tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi empiris terhadap literatur *blue accounting* yang masih terbatas, sekaligus menyediakan rekomendasi praktis bagi BUMN maritim dalam memperkuat akuntabilitas keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana PT. PELNI (Persero) mengintegrasikan prinsip *Sustainable Development Goal* (SDG) 14 Life Below Water dalam praktik akuntansi dan pelaporan keberlanjutannya. Penelitian kualitatif bersifat interpretatif, bertujuan memahami makna yang melekat pada aktivitas perusahaan melalui analisis dokumen (Paterson, 2016). Penelitian deskriptif melibatkan pengumpulan data untuk memberikan gambaran rinci tentang suatu fenomena, situasi, atau masalah (Weirich et al., 2020). Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap fenomena pelaporan keberlanjutan kelautan (*blue accounting*) dalam konteks sektor maritim nasional.

Penelitian dilakukan pada PT. PELNI (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pelayaran niaga dan logistik maritim. Data yang dianalisis berasal dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan selama periode 2019–2023, dokumen GRI Standards, dokumen SDG 14 dari situs *United Nations*, literatur akademik, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan menelusuri dokumen resmi perusahaan yang tersedia secara publik, termasuk laporan yang mengandung pengungkapan terkait lingkungan laut, konservasi, limbah, serta program sosial di wilayah pesisir. Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dikembangkan dalam bentuk tematik dan kategorikal. Prosedur yang dilakukan meliputi:

1. Identifikasi Aktivitas

Menandai aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan laut dalam dokumen perusahaan (CSR, program kelautan, konservasi, pelibatan masyarakat pesisir).

2. Klasifikasi Pengeluaran (*Blue expense*)

Mengelompokkan biaya berdasarkan kategori GRI yang relevan, seperti GRI 304-3 (konservasi habitat), GRI 306-2 (pengelolaan limbah), dan GRI 413-1 (masyarakat lokal).

3. Pemetaan SDG 14

Aktivitas perusahaan dipetakan ke indikator resmi SDG 14 berdasarkan dokumen *Business Reporting on the SDGs: An Analysis of Goals and Targets* (GRI & UNGC, 2017).

4. Analisis Tren

Dibuat grafik tren dan tabulasi jumlah atau jenis pengeluaran dari tahun ke tahun (2019–2023).

5. Interpretasi Kualitatif

Menganalisis narasi yang muncul dalam laporan untuk menilai kesesuaian pelaporan PT. PELNI dengan prinsip *blue accounting*.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Gambaran Umum PT. PELNI (Persero)

PT. PELNI (Persero) adalah BUMN yang beroperasi di sektor pelayaran nasional sejak 1952. Perusahaan memiliki peran strategis dalam konektivitas antarpulau, khususnya wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Sebagai perusahaan yang beroperasi langsung di sektor kelautan, aktivitas bisnis PELNI sangat bergantung pada dan berdampak terhadap ekosistem laut dan pesisir. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip keberlanjutan lingkungan laut dan pelaporan tanggung jawab sosial menjadi sangat penting, terutama dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(*Sustainable Development Goals / SDGs*) — khususnya SDG 14: Life Below Water. Menurut data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan PT. PELNI (2019–2023), perusahaan telah menjalankan berbagai inisiatif pelestarian lingkungan laut seperti pengolahan limbah kapal, konservasi mangrove di sekitar pelabuhan, serta edukasi komunitas pesisir. Namun, aktivitas ini belum secara eksplisit diklasifikasikan sebagai bagian dari *blue accounting*.

Sebagaimana dinyatakan oleh Adams (2022), perusahaan yang beroperasi di sektor berdampak tinggi terhadap lingkungan seperti energi, tambang, dan transportasi laut harus mulai mengintegrasikan prinsip akuntansi berkelanjutan (*sustainability accounting*) ke dalam sistem pelaporannya. Dalam konteks ini, *blue accounting* muncul sebagai pendekatan yang tepat. Konsep ini menurut Abreu et al (2019) adalah bagian dari sistem akuntansi keberlanjutan yang memfokuskan pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan aktivitas ekonomi yang berdampak pada lingkungan laut.

Aktivitas dan Program yang Mendukung SDG 14

Analisis terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan PT. PELNI (2019–2023) menunjukkan sejumlah inisiatif utama yang sejalan dengan SDG 14 dan prinsip *blue accounting*:

1. **Konservasi ekosistem laut:** Penanaman mangrove di Kepulauan Seribu dan Banyuwangi, serta revitalisasi terumbu karang dengan teknologi *Domus Coronarius Circularis*.
2. **Pengelolaan limbah laut:** Pembangunan Rumah Kelola Sampah (RKS) di Baubau (93 ton sampah dikelola pada 2021) serta pengurangan limbah kapal dan efluen melalui IPAL (2023).
3. **Pengurangan emisi dan energi bersih:** Implementasi biodiesel 100% pada armada sejak 2021 yang berdampak pada penurunan polusi laut dan udara.
4. **Edukasi masyarakat pesisir:** Program *Tour on Board* dan *PELNI Mengajar* yang menekankan edukasi konservasi laut.

Program-program tersebut dapat dipetakan secara langsung ke target SDG 14, misalnya mangrove dan terumbu karang mendukung target 14.2, sedangkan pengelolaan limbah kapal relevan dengan target 14.1 (lihat Tabel 1 dan 2).

Identifikasi dan Klasifikasi *Blue expense*

Menurut Abreu et al (2019), *blue expense* merupakan pengeluaran perusahaan yang berkontribusi langsung pada konservasi, perlindungan, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut. Dalam konteks ini, PT. PELNI mengeluarkan sejumlah biaya yang dapat dikategorikan sebagai *blue expense*, meskipun dalam praktiknya belum diklasifikasikan secara eksplisit di dalam sistem akuntansi dan pelaporan resmi perusahaan. Kriteria pengeluaran yang dikategorikan sebagai *blue expense* meliputi:

- a. Mendukung target SDG 14 secara langsung.
- b. Terkait dengan aktivitas lingkungan laut dan pesisir.
- c. Dapat dipetakan ke indikator GRI: GRI 304 (keanekaragaman hayati), GRI 306 (limbah), GRI 203 (infrastruktur publik), dan GRI 413 (keterlibatan masyarakat lokal).

Hasil analisis pada tabel 2 menunjukkan bahwa sejumlah pengeluaran PT. PELNI dapat dikategorikan sebagai *blue expense*. Contohnya: konservasi pesisir (GRI 304-3), pengelolaan limbah laut (GRI 306-2), edukasi masyarakat pesisir (GRI 413-1), dan infrastruktur IPAL (GRI 203-1). Namun, pengeluaran ini belum secara eksplisit dipisahkan dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya potensi integrasi *blue expense* lebih sistematis dalam pelaporan keberlanjutan.

Tren dan Perkembangan Pelaporan SDG 14 dalam Laporan PT. PELNI (2019–2023)

Berdasarkan analisis isi laporan tahunan dan keberlanjutan PT. PELNI periode 2019–2023 yang dapat dilihat pada tabel 3, terlihat adanya perubahan signifikan dalam narasi, kedalaman informasi, serta volume pengeluaran yang mendukung SDG 14 (Life Below Water).

a. Tahun 2019–2020:

Pada periode ini, laporan PT. PELNI masih berupa narasi umum terkait kegiatan CSR lingkungan. Pengeluaran untuk aktivitas yang relevan dengan SDG 14 masih terbatas dan belum diklasifikasikan secara khusus.

b. Tahun 2021:

Terjadi peningkatan baik dalam jumlah pengeluaran maupun kualitas narasi pelaporan. Aktivitas Rumah Kelola Sampah (RKS) di Baubau yang dikaitkan dengan SDG 14.1 menunjukkan integrasi kegiatan berbasis laut ke dalam kerangka keberlanjutan. Estimasi pengeluaran untuk tahun ini mencapai Rp 800 juta.

c. Tahun 2022:

Pelaporan semakin eksplisit, dengan penekanan pada program revitalisasi terumbu karang (*Domus Coronarius Circularis*), edukasi laut, dan konservasi habitat pesisir. Estimasi pengeluaran untuk kegiatan SDG 14 sebesar Rp 950 juta.

d. Tahun 2023:

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun ini, terutama karena adanya pengelolaan limbah kapal, pembangunan IPAL, dan edukasi pesisir berskala nasional. Estimasi total pengeluaran untuk kegiatan SDG 14 mencapai Rp 1,9 miliar.

Grafik Gambar 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam pengeluaran *blue expense* dari tahun 2019 hingga 2021, dengan puncaknya pada tahun 2021 (Rp 818,5 juta). Penurunan drastis terjadi pada tahun 2022, yang disebabkan oleh penurunan skala kegiatan atau efisiensi biaya dalam program pelestarian. Namun, pada tahun 2023 terjadi rebound, dengan pengeluaran mencapai lebih dari Rp 428 juta yang difokuskan pada pengelolaan limbah kapal dan rehabilitasi terumbu karang. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun fluktuatif, komitmen PT. PELNI terhadap konservasi laut dan lingkungan pesisir tetap terjaga dan semakin terarah ke program-program berbasis indikator keberlanjutan laut.

Pemetaan Aktivitas terhadap Indikator SDG 14 dan GRI

Pemetaan ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara aktivitas nyata yang dilakukan PT. PELNI dengan target dan indikator SDG 14 serta standar pelaporan keberlanjutan GRI yang relevan. Hal ini sejalan dengan prinsip *blue accounting* yang mengedepankan transparansi, keterukuran, dan pelaporan terstandarisasi atas aktivitas yang berdampak terhadap laut dan pesisir.

Tabel 4 menunjukkan bahwa aktivitas keberlanjutan laut yang dijalankan PT. PELNI pada periode 2019–2023 dapat dipetakan secara langsung ke target SDG 14 dan indikator GRI yang relevan, sekaligus disertai tahun sumber pelaporan. Penambahan informasi tahun laporan membantu menelusuri keakuratan pelaporan serta memvalidasi kontinuitas aktivitas. Dengan ini, terlihat bahwa kontribusi perusahaan terhadap SDG 14 bersifat konsisten dan mencakup beragam aspek seperti konservasi ekosistem (GRI 304), pengelolaan limbah (GRI 306), pembangunan infrastruktur komunitas (GRI 203), dan edukasi pesisir (GRI 413).

Meskipun PT. PELNI belum secara eksplisit menyajikan pemetaan ini dalam dokumen resmi, pengorganisasian ulang data berdasarkan indikator SDG dan GRI menunjukkan bahwa struktur pelaporan perusahaan dapat dikembangkan lebih lanjut ke arah pelaporan *blue accounting* yang terintegrasi. Penyajian pemetaan seperti ini juga berperan sebagai alat bantu audit keberlanjutan, pemantauan kinerja SDG, dan pelaporan kepada stakeholder eksternal. Hal ini mendukung pendapat Abreu et al. (2019) bahwa *blue accounting* memerlukan standar pelaporan yang menghubungkan aktivitas, biaya, dan indikator keberlanjutan.

Evaluasi Kesesuaian Pelaporan dengan Prinsip *Blue accounting*

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT. PELNI telah menjalankan sebagian besar elemen dasar dari prinsip *blue accounting*, namun belum mengimplementasikannya secara sistematis. Narasi keberlanjutan dan aktivitas laut telah dilaporkan secara konsisten, tetapi klasifikasi keuangan dan pemetaan indikator masih terbatas. Hal ini sesuai dengan temuan Adams, (2022) dan Abreu et al. (2019) yang menyatakan bahwa *blue accounting* memerlukan keterhubungan eksplisit antara aktivitas, pembiayaan, dan pelaporan berbasis SDG. Tanpa klasifikasi yang terstruktur, transparansi dan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan akan sulit diukur secara eksternal.

Tabel 5 hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT. PELNI telah memulai inisiatif keberlanjutan laut yang substansial namun belum sepenuhnya terstruktur dalam kerangka pelaporan *blue accounting*. Dimensi "Klasifikasi *Blue expense*" menandakan celah terbesar, karena belum adanya akun atau label khusus dalam laporan keuangan untuk kegiatan berbasis laut. Hal ini menyulitkan pelacakan dan evaluasi efisiensi penggunaan dana secara spesifik untuk SDG 14.

Sementara itu, pemetaan aktivitas terhadap indikator SDG dan GRI sebagian besar dilakukan dalam bentuk naratif atau tabel analitik eksternal (oleh peneliti), tetapi belum terintegrasi dalam laporan resmi perusahaan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik dan pelaporan. Dimensi "Keterukuran dan Transparansi" mengalami kemajuan, dengan adanya data kuantitatif seperti jumlah bibit mangrove yang ditanam atau jumlah peserta edukasi pesisir. Namun, pelaporan belum menyertakan total anggaran atau target capaian yang dikaitkan langsung dengan indikator keberlanjutan laut.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada "Integrasi dalam Laporan Sustainability", di mana sejak 2021 PT. PELNI mulai memasukkan narasi SDG 14 secara konsisten, menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap pelaporan keberlanjutan. Dengan demikian, perusahaan menunjukkan arah yang positif, namun diperlukan penguatan dalam aspek klasifikasi pengeluaran, struktur pelaporan indikator, dan pengukuran berbasis hasil.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PT. PELNI telah menjalankan sejumlah inisiatif keberlanjutan laut yang relevan dengan prinsip *blue accounting*. Meskipun pengelompokan keuangan dan pemetaan indikator keberlanjutan belum sepenuhnya terintegrasi dalam laporan resmi, aktivitas konservasi, edukasi pesisir, dan pengelolaan limbah telah dilakukan secara konsisten. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan akuntabel di masa depan, khususnya dalam konteks penguatan transparansi SDG 14 di sektor maritim.

Diskusi

Temuan penelitian ini memperkuat teori legitimasi, di mana perusahaan melaporkan aktivitas lingkungan untuk memperoleh dukungan sosial dan memperkuat reputasi (Deegan, 2002). Hal ini juga sejalan dengan kajian (Winarsih et al., 2020) bahwa *blue accounting* berfungsi sebagai instrumen strategis, bukan sekadar pelaporan administratif. Meskipun demikian, praktik PT. PELNI masih bersifat parsial karena belum ada klasifikasi *blue expense* formal dan pemetaan indikator yang sistematis.

Secara akademis, penelitian ini memperluas literatur *blue accounting* dengan memberikan bukti empiris di sektor BUMN maritim Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PELNI dapat mengembangkan sistem pelaporan yang lebih transparan melalui integrasi SDG–GRI–biaya–output.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa PT. PELNI telah melaksanakan berbagai program yang mendukung SDG 14, seperti penanaman mangrove, revitalisasi terumbu karang, pengelolaan limbah kapal, dan edukasi masyarakat pesisir. Aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai *blue expense*, namun klasifikasinya belum diungkapkan secara eksplisit dalam laporan keuangan maupun keberlanjutan. Tren pengeluaran menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun pengungkapan masih parsial.

Secara keseluruhan, praktik PT. PELNI telah bergerak menuju *blue accounting*, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek klasifikasi, keterukuran, dan pemetaan indikator.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya PT. PELNI mengembangkan sistem klasifikasi *blue expense* yang lebih terstruktur, memetakan aktivitas ke indikator SDG–GRI secara konsisten, serta meningkatkan transparansi dan auditabilitas pelaporan keberlanjutan. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder dari laporan perusahaan tanpa verifikasi internal, serta fokus pada satu studi kasus yang membatasi generalisasi.

Saran penelitian ke depan adalah mengembangkan model *blue accounting* lintas sektor maritim, melakukan wawancara mendalam dengan manajemen perusahaan, dan mengkaji persepsi pemangku kepentingan terhadap pengungkapan *blue expense*.

DAFTAR PUSTAKA

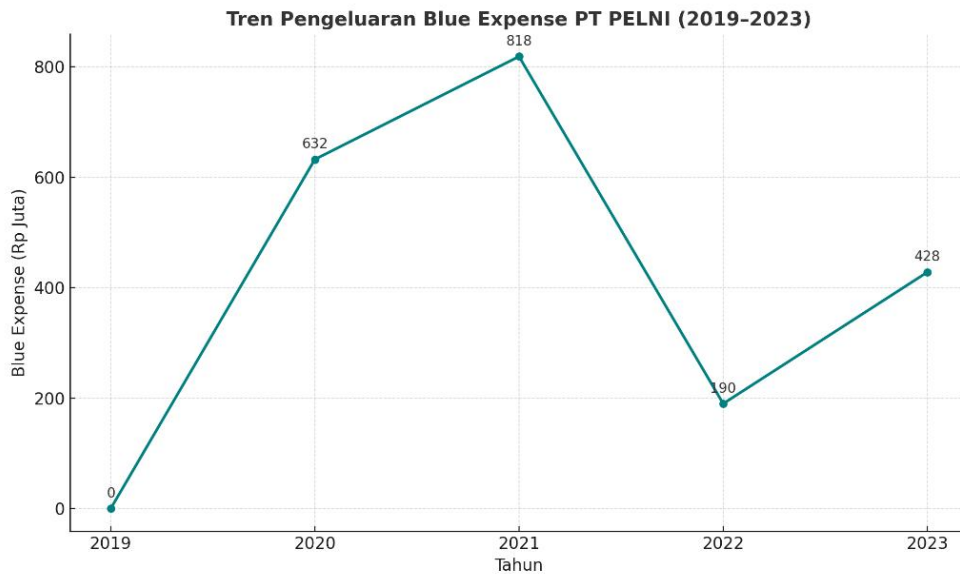
- Abreu, R., David, F., Santos, L. L., Segura, L., & Formigoni, H. (2019). *Blue accounting: Looking for a New Standard*. In D. Crowther, S. Seifi, & T. Wond (Eds.), *Responsibility and Governance* (pp. 27–43). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1047-8_3
- Adams, C. (Ed.). (2022). *Handbook of Accounting and Sustainability*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800373518>
- Ardiansyah, A., & Umarella, B. (2022). PENGUNGKAPAN *BLUE ACCOUNTING* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI MALUKU. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 6(3), 102–112. <https://doi.org/10.30738/ad.v6i3.13300>
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Failler, P., Liu, J., Lallemand, P., & March, A. (2023). *Blue accounting Approaches in the Emerging African Blue Economy Context*. *Journal of Sustainability Research*. <https://doi.org/10.20900/jsr20230002>
- GRI, & UN Global Compact. (2022). *Business Reporting on the SDGs: An Analysis of Goals and Targets*. <https://sdgcompass.org/download/business-reporting-on-the-sdgs-an-analysis-of-goals-and-targets/>
- Huck, W. (2022). *Sustainable Development Goals: Article-by-Article Commentary*. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. <https://doi.org/10.5771/9783748902065>
- Khaddafi, M., & Ilham, R. N. (2024). *The Influence of Blue accounting, Corporate Social Responsibility, and Stakeholders Influence Capacity on Financial Performance*. 3(8).
- Krestiwanda, L. J. V., & Utami, I. (2024). Pertanggungjawaban Sosial Akuntansi Biru: Studi Pada Perusahaan Perikanan Go-public Di Indonesia. *Owner*, 8(3), 2994–3006. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2211>

- Mougenot, B., & Doussoulin, J.-P. (2023). A bibliometric analysis of the *Global Reporting Initiative (GRI)*: Global trends in developed and developing countries. *Environment, Development and Sustainability*, 26(3), 6543–6560. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-02974-y>
- Paterson, A. (2016). *Research methods for accounting and finance: A guide to writing your dissertation*. Goodfellow Publishers Ltd.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Syah, S., Saraswati, E., Sukoharsono, E. G., & Roekhudin. (2020). *Blue accounting and Sustainability. Proceedings of the 23rd Asian Forum of Business Education (AFBE 2019)*. 23rd Asian Forum of Business Education (AFBE 2019), Tanjung Benoa, Bali, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200606.085>
- United Nations. (2024, May 21). *Sustainable Development Goal 14: Life Below Water*. Target and Indicators: Sustainable Development Goal 14: Life Below Water. <https://sdgs.un.org/goals/goal14>
- Weirich, T. R., Pearson, T. C., & Churyk, N. T. (2020). *Accounting & Auditing Research: Tool & Strategies* (Tenth). Wiley.
- Winarsih, Fuad, K., & Setyawan, H. (2020). *Blue accounting of the Marine Knowledge and Sustainable Seas: A Conceptual Model*. In L. Barolli, F. K. Hussain, & M. Ikeda (Eds.), *Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems* (Vol. 993, pp. 954–958). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22354-0_90
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: <https://sdgs.un.org/goals>



Gambar 2. Grafik Tren Pengeluaran *Blue expense* PT. PELNI (2019–2023)
Sumber: *Sustainability Report PT. PELNI 2019-2023*

Tabel 1 Kaitan Langsung Target SDG 14 dengan Program PELNI

Target SDG 14	Program PELNI yang Relevan
14.1 – Mengurangi polusi laut	Pengelolaan limbah kapal, penggunaan biodiesel, rumah kelola sampah
14.2 – Perlindungan ekosistem laut	Penanaman mangrove, revitalisasi terumbu karang
14.3 – Mengurangi dampak asidifikasi laut	Edukasi emisi karbon dan pemakaian BBM bersih
14.b – Akses masyarakat pesisir	Pelatihan, pemberdayaan nelayan, dan program komunitas pesisir

Sumber: *Sustainability Report PT. PELNI 2019-2023*

Tabel 2 Tabel Klasifikasi Blue expense PT. PELNI (2019–2023)

Tahun	Program/ Aktivitas	GRI Indikator	Target SDG 14	Kategori Blue expense
2019	Penanaman mangrove tahap awal di Kepulauan Seribu	GRI 304-3	14.2, 14.5	Konservasi ekosistem pesisir
2020	Program Biodiesel 20% dan efisiensi bahan bakar	GRI 305-5	14.1, 14.3	Energi bersih dan emisi laut
2021	Rumah Kelola Sampah Baubau dan pengelolaan 93 ton sampah	GRI 306-2, 203-1	14.1, 14.b	Pengelolaan limbah laut
2022	Revitalisasi terumbu karang: Domus Coronarius Circularis	GRI 304-2, 304-3	14.2	Rehabilitasi habitat laut
2023	Program edukasi laut dan Tour on Board di 10 pelabuhan	GRI 413-1, 203-1	14.b	Edukasi masyarakat pesisir
2023	Pengurangan limbah kapal dan efluen (pengolahan IPAL)	GRI 306-2, 303-2	14.1	Infrastruktur limbah kapal

Sumber: *Sustainability Report PT. PELNI 2019-2023*

Tabel 3 Ringkasan Aktivitas Utama yang Berkaitan dengan Blue expense pada PT. PELNI tahun 2019-2023

Tahun	Total Blue expense	Aktivitas Utama
2019	Tidak mencantumkan biaya yang dikeluarkan	Revitalisasi terumbu karang Indonesia yaitu di wilayah Pulau Bangka, Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dan Pulau Sepa, Kepulauan Seribu.
2020	Rp 632.205.000	Penggunaan biodiesel B-20, efisiensi energi, dan revitalisasi terumbu karang di Pulau Bangka, Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dan Pulau Sepa, Kepulauan Seribu.
2021	Rp 818.500.000	Revitalisasi Maluku Utara dan Jawa Timur, Penanaman Mangrove di Kepulauan Seribu
2022	Rp 190.070.000	Melakukan penanaman 5.000 bibit mangrove secara bertahap di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, membangun 1 (satu) Domus Coronarius Circularis guna merevitalisasi (penanaman kembali) terumbu karang, dan Perawatan tanaman mangrove Pulau Harapan, Kepulauan Seribu
2023	Rp 428.130.520	Pengelolaan limbah cair kapal, IPAL, edukasi masyarakat pesisir mengenai pentingnya menjaga ekosistem pantai, dan rehabilitasi 1.000 terumbu karang di Pantai Bangsring, Banyuwangi

Sumber: Sustainability Report PT. PELNI 2019-2023

Tabel 4 Matriks Pemetaan Aktivitas terhadap Target SDG 14 dan Indikator GRI

No	Aktivitas PT. PELNI	Target SDG 14	Indikator SDG	Indikator GRI Relevan	Sumber
1.	Penanaman mangrove (Kepulauan Seribu, Banyuwangi, dst)	14.2, 14.5	14.2.1, 14.5.1	GRI 304-2, GRI 304-3	SR PELNI 2021, 2022, 2023
2.	Revitalisasi terumbu karang (Domus Coronarius Circularis)	14.2, 14.5	14.2.1, 14.5.1	GRI 304-2	SR PELNI 2019-2023
3.	Rumah Kelola Sampah (RKS) dan pengolahan limbah kapal	14.1, 14.b	14.1.1, 14.b.1	GRI 306-2, GRI 203-1	SR PELNI 2021-2023
4.	Pengurangan emisi dan penggunaan biodiesel	14.1, 14.3	14.1.1, 14.3.1	GRI 305-5, GRI 303-2	SR PELNI 2019-2023
5.	Edukasi lingkungan & Tour on Board	14.b	14.b.1	GRI 413-1, GRI 203-1	SR PELNI 2023
6.	Investasi infrastruktur pengelolaan limbah cair kapal dan efisiensi lingkungan pelabuhan	14.1, 14.3	14.1.1, 14.3.1	GRI 303-2, GRI 306-2, GRI 203-1	SR PELNI 2023

Sumber: Diolah dari laporan keberlanjutan PT. PELNI (2019–2023)

Tabel 5 Hasil Evaluasi Pelaporan PT. PELNI

Dimensi Evaluasi	Status Penerapan (2019–2023)	Penjelasan
Klasifikasi Blue expense	Belum eksplisit	Pengeluaran untuk SDG 14 belum dipisahkan secara formal, masih masuk dalam CSR lingkungan umum.
Pemetaan Aktivitas–SDG/GRI	Parsial–Manual	Pemetaan dapat dilakukan, namun belum tersedia dalam format resmi pada laporan perusahaan.
Keterukuran dan Transparansi Data	Cukup memadai	Beberapa data kuantitatif tersedia, namun belum lengkap untuk seluruh program.
Integrasi dalam Laporan Resmi	Konsisten meningkat	Aktivitas dan narasi SDG 14 makin sering dimuat di SR sejak 2021 secara lebih terstruktur.

Sumber: Diolah dari laporan keberlanjutan PT. PELNI (2019–2023)